



---

**KLIPING DIGITAL  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBIAYAAN  
INFRASTRUKTUR  
PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN**

**15 – 16 Mei 2023**

---



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16 / 05 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

NO	ANALISIS		TONE
1	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b> <b>JUDUL</b> <b>NARASUMBER</b> <b>RESUME</b>	<p>Senin, 15 Mei 2023</p> <p><a href="https://kaltim.tribunnews.com/2023/05/15/pakai-skema-apbn-dan-kpbu-apartemen-asn-di-ikn-nusantara-mulai-dibangun-juli-ini?page=all">https://kaltim.tribunnews.com/2023/05/15/pakai-skema-apbn-dan-kpbu-apartemen-asn-di-ikn-nusantara-mulai-dibangun-juli-ini?page=all</a></p> <p>Pakai Skema APBN dan KPBU, Apartemen ASN di IKN Nusantara Mulai Dibangun Juli Ini</p> <p>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono</p> <p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap pembangunan <u>apartemen ASN</u> di <u>Ibu Kota Nusantara</u> atau <u>IKN</u> Nusantara, <u>Kalimantan Timur</u> akan dimulai pada Juli 2023. Dilansir dari <u>Kontan</u>, Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan <u>IKN</u> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga menjelaskan, proses pembangunan rusun <u>IKN</u> rencananya akan dibangun dengan skema APBN dan KPBU. Saat ini tender pembangunan rusun <u>IKN</u> dengan skema APBN sedang dalam proses. Yakni pembangunan 47 tower dengan 12 lantai sekitar Rp 9,1 triliun. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, untuk membangun hunian <u>ASN</u> di <u>IKN</u> diperlukan biaya Rp 51,4 triliun.</p>	+
2	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b> <b>JUDUL</b> <b>NARASUMBER</b>	<p>Senin, 15 Mei 2023</p> <p><a href="https://finance.detik.com/properti/d-6721757/program-sejuta-rumah-baru-298203-unit-jelang-tengah-tahun-bisa-capai-target">https://finance.detik.com/properti/d-6721757/program-sejuta-rumah-baru-298203-unit-jelang-tengah-tahun-bisa-capai-target</a></p> <p>Program Sejuta Rumah Baru 298.203 Unit Jelang Tengah Tahun, Bisa Capai Target?</p> <p>Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur</p>	+



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

16 / 05 / 2023

Analisis Pemberitaan Media Online

	<b>RESUME</b>	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat perkembangan Program Sejuta Rumah (PSR). Per 30 April 2023, sudah ada sekitar 298.203 unit rumah yang dibangun. Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur mengungkapkan, capaian PSR tersebut atau 84% terdiri dari 252.875 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya 16% sebanyak 45.328 unit non MBR. Capaian tersebut meningkat karena di bulan Maret 2023 capaian PSR tercatat hanya 183.331 unit. Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, jumlah capaian rumah MBR berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan total 104.286 unit. Angka tersebut berasal dari kegiatan pembangunan Ditjen Perumahan 57.549 unit dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) dengan penyaluran dana pembiayaan perumahan untuk masyarakat melalui KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebanyak 46.737 unit.	
3	<b>TANGGAL</b> <b>MEDIA</b> <b>JUDUL</b> <b>NARASUMBER</b> <b>RESUME</b>	Senin, 15 Mei 2023 <a href="https://kumparan.com/kumparanbisnis/bp-tapera-tawarkan-insentif-untuk-pengembang-rumah-dari-data-hingga-modal-kerja-20PLUhgIFtT/full">https://kumparan.com/kumparanbisnis/bp-tapera-tawarkan-insentif-untuk-pengembang-rumah-dari-data-hingga-modal-kerja-20PLUhgIFtT/full</a> BP Tapera Tawarkan Insentif untuk Pengembang Rumah, Dari Data hingga Modal Kerja Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Hari Sundjojo Badan Pengelola Tabungan <a href="#">Perumahan</a> Rakyat atau <a href="#">BP Tapera</a> , menawarkan sejumlah keuntungan menarik kepada pengembang yang membangun <a href="#">Rumah</a> Tapera berkualitas dan tepat sasaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Hari Sundjojo menambahkan, modal kerja yang akan diperoleh dari bank dan sumber dananya dapat berasal dari penempatan dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tanah untuk pengadaan tanah, KIK konstruksi untuk pembangunan unit rumah, dan berkesempatan mengakses <a href="#">KPR</a> belum siap huni yang sedang disiapkan oleh BP Tapera saat ini.	+



15 / 05 / 2023

Sumber: tribunnews.com

---

## **Pakai Skema APBN dan KPBU, Apartemen ASN di IKN Nusantara Mulai Dibangun Juli Ini**

Penulis: Rafan Arif Dwinanto

Editor: Faizal Amir

**TRIBUNKALTIM.CO** - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap pembangunan apartemen ASN di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur akan dimulai pada Juli 2023.

Dilansir dari Kontan, Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga menjelaskan, proses pembangunan rusun IKN rencananya akan dibangun dengan skema APBN dan KPBU.

Saat ini tender pembangunan rusun IKN dengan skema APBN sedang dalam proses.

Yakni pembangunan 47 tower dengan 12 lantai sekitar Rp 9,1 triliun.

"Kita harapkan bisa mulai Juli (proses konstruksi) yang hunian ASN," ujar Danis saat ditemui di Kementerian PUPR, Jumat (12/5).

Danis memastikan, pembangunan IKN tidak terpengaruh dengan adanya revisi UU IKN. Sebab, pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan anggaran tentang pelaksanaan APBN.

Juru Bicara RUU IKN Diani Sadiawati mengatakan, proses revisi UU IKN sedang

dalam tahap rapat panitia antar kementerian (PAK).

Diani memastikan, porsi pendanaan APBN dalam pembangunan IKN tetap 20 persen.

"(Diharapkan) Juli selesai ditetapkan DPR," ujar Diani.

Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, berikut daftar tender proyek rusun IKN.

Pertama, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN 1 senilai Rp 1,7 triliun.

Kedua, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN 2 senilai Rp 1,5 triliun.

Ketiga, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN 3 senilai Rp 1,1 triliun.

Keempat, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN 4 senilai Rp 1,5 triliun.

Kelima, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun Polri dan BIN senilai Rp 1,5 triliun.



15 / 05 / 2023

Sumber: tribunnews.com

Keenam, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun pasukan pengamanan presiden (pasampres) senilai Rp 1,8 triliun.

Jika tidak ada perubahan, keenam proyek tersebut rencananya akan melangsungkan penandatanganan kontrak pada 28 Juli 2023.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, untuk membangun hunian ASN di IKN diperlukan biaya Rp 51,4 triliun.

Hal itu dikemukakan Menteri PUPR dalam Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dalam rangka Pembahasan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, pada Rabu (29/03/2023).

Basuki menyampaikan, terdapat beberapa skenario skema pembiayaan penyediaan perumahan di IKN.

"16.990 unit rumah untuk ASN dan Hankam, hingga Januari 2023 yaitu 2.585 unit diusulkan dibangun menggunakan APBN dengan estimasi biaya sebesar Rp 9,4 triliun," ujar Basuki dikutip dari laman Kementerian PUPR.

Berikutnya, untuk pembangunan sebanyak 9.295 unit rumah direncanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dengan estimasi biaya sebesar Rp 35,8 triliun.

"Serta, 5.110 unit rusun milik perlu mengajak investasi swasta/pengembang perumahan dengan estimasi biaya sebesar Rp 6,2 triliun," jelasnya.

Sebelumnya Menteri PUPR itu menargetkan pembangunan hunian ASN dan Hankam di IKN, bisa dimulai pada Juni atau Juli 2023.

Jika demikian, pekerjaan bisa selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 2024 mendatang.

<https://kaltim.tribunnews.com/2023/05/15/pakai-skema-apbn-dan-kpbu-apartemen-asn-di-ikn-nusantara-mulai-dibangun-juli-ini?page=all>



15 / 05 / 2023

Sumber: [finance.detik.com](https://finance.detik.com)

---

## **Program Sejuta Rumah Baru 298.203 Unit Jelang Tengah Tahun, Bisa Capai Target?**

Author: Almadinah Putri Brilian

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat perkembangan Program Sejuta Rumah (PSR). Per 30 April 2023, sudah ada sekitar 298.203 unit rumah yang dibangun.

"PSR tahun ini tuh baru sampai 298.203 unit," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur di Media Center Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023).

Fitrah mengungkapkan, capaian PSR tersebut atau 84% terdiri dari 252.875 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya 16% sebanyak 45.328 unit non MBR. Capaian tersebut meningkat karena di bulan Maret 2023 capaian PSR tercatat hanya 183.331 unit.

Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, jumlah capaian rumah MBR berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan total 104.286 unit. Angka tersebut berasal dari kegiatan pembangunan Ditjen Perumahan 57.549 unit dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) dengan penyaluran dana pembiayaan perumahan untuk masyarakat melalui KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebanyak 46.737 unit.

Selanjutnya adalah pembangunan rumah yang dilaksanakan kementerian dan lembaga (K/L) lainnya sebanyak 4.286 unit, pemerintah daerah 2.127 unit, pengembang non-FLPP 133.716 unit, CSR perumahan 153 unit dan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebanyak 8.307 unit. Sementara untuk rumah non-MBR dibangun oleh pengembang 16.246 unit dan masyarakat 29.082 unit.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini pemerintah meningkatkan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada pengembang, dari yang sebelumnya 30% menjadi 50%. Nantinya, pemerintah juga membantu dalam penyediaan air bersih, sistem persampahan, lampu, dan lainnya. Jadi, tidak hanya jalan lingkungan atau jalanan sekitar perumahan saja yang dibantu oleh pemerintah.

"Kami sudah merevisi juga Permen 7 Tahun 2022 terkait insentif kepada pengembang yang awalnya hanya 30% dari site plant sekarang bisa maksimal 50%. Jadi sebenarnya bisa mengcover itu sebenarnya, kekurangan dari harga rumah kita bisa bantu PSU 50% dari kapasitas site plant," paparnya.

Tak hanya itu, ia juga membantu pemerintah daerah dalam menyediakan akses jalan menuju rumah subsidi. Namun demikian, hal tersebut harus ada delegasi dari pemerintah daerah bahwa akses itu adalah jalan perumahan.



## KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

---

15 / 05 / 2023

| Sumber: [finance.detik.com](https://finance.detik.com)

---

“Jadi kami sudah banyak menunya sekarang untuk membantu terutama teman-teman pengembang yang subsidi,” tuturnya.

<https://finance.detik.com/properti/d-6721757/program-sejuta-rumah-baru-298203-unit-jelang-tengah-tahun-bisa-capai-target>



15 / 05 / 2023

Sumber: kumparan.com

---

## **BP Tapera Tawarkan Insentif untuk Pengembang Rumah, Dari Data hingga Modal Kerja**

Writer: Angga Sukmawijaya  
Editor: Moh Fajri

Badan Pengelola Tabungan [Perumahan](#) Rakyat atau [BP Tapera](#), menawarkan sejumlah keuntungan menarik kepada pengembang yang membangun [Rumah](#) Tapera berkualitas dan tepat sasaran bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Pengembang yang akan membangun Rumah Tapera mendapatkan keuntungan yang menarik. Di antaranya adalah akses informasi ke data demand yang terdiri dari lokasi kebutuhan, profiling dan preferensi rumah MBR. Selain itu adalah pengembang akan mendapatkan akses ke modal kerja yang bersumber dari dana yang dikelola oleh BP Tapera," ujar Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera Hari Sundjojo dikutip dari *Antara*, Senin (15/5).

Hari Sundjojo menambahkan, modal kerja yang akan diperoleh dari bank dan sumber dananya dapat berasal dari penempatan dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tanah untuk pengadaan tanah, KIK konstruksi untuk pembangunan unit rumah, dan berkesempatan mengakses [KPR](#) belum siap huni yang sedang disiapkan oleh BP Tapera saat ini.

"Selain keuntungan di atas, kami juga akan memberikan *privileges* kepada pengembang yang membangun rumah Tapera dengan pencantuman (*flagging*) pada aplikasi Si Kumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang), Si Kasep (Sistem informasi KPR Subsidi

Perumahan) dan Tapera Mobile. Akses demand, rating kualitas bangunan serta kegiatan pemasaran bersama dengan corporate identity (CI) dan branding difasilitasi oleh BP Tapera," katanya.

Untuk itu, BP Tapera mengajukan kriteria pengembang yang akan digandeng dan meminta masukan dari asosiasi atas usulan tersebut. Persyaratan tersebut di mana pengembang yang akan membangun Rumah Tapera telah membangun rumah subsidi selama 3 tahun terakhir minimal 500 unit.

Selain itu, pengembang juga menerima fasilitas pembiayaan perumahan dari bank minimal Rp 10 miliar dengan kualitas lancar, tidak masuk dalam perusahaan yang menjadi temuan dari pihak eksternal, serta memiliki rencana pembangunan rumah subsidi minimal 100 unit sedang bagi pengembang baru cukup dengan mengajukan proposal proyek penyediaan Rumah Tapera.

"Kami menunggu respons dari asosiasi perumahan setelah diskusi ini. Sehingga kami harapkan ke depan ada kesepakatan antara BP Tapera dan asosiasi pengembang perumahan mengenai hal ini," ujar Hari Sundjojo.

Ke depan, asosiasi pengembang perumahan akan mendaftarkan anggotanya yang berminat dan memenuhi persyaratan. Selanjutnya





15 / 05 / 2023

Sumber: kumparan.com

asosiasi akan mengajukan secara resmi kepada BP Tapera.

Tahapan berikutnya adalah BP Tapera akan melakukan verifikasi syarat-syarat yang harus dipenuhi pengembang. Jika syarat sudah terpenuhi maka akan dilakukan pembahasan mengenai skema pembiayaan yang akan dibutuhkan oleh pengembang dan selanjutnya akan dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara asosiasi pengembang perumahan dengan BP Tapera.

Sesuai dengan visi mewujudkan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui

pembiayaan dana murah berkelanjutan berlandaskan gotong royong, BP Tapera mewujudkan melalui program Rumah Tapera.

Rumah Tapera dibangun dengan sistem kontrol Close Loop yang mengubah Supply Driven menjadi Demand Driven sehingga diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang ideal antara konsumen, pengembang dan bank sehingga tujuan dalam mewujudkan kualitas, keterhunian dan ketepatan sasaran dapat tercapai.

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/bp-tapera-tawarkan-insentif-untuk-pengembang-rumah-dari-data-hingga-modal-kerja-20PLUhgIFtT/full>